

MEMILIH PEMIMPIN JABAR YANG “NYANTRI, NYAKOLA, NYUNDA”



Dedy Mulyana, S.H., M.H.
(Dosen Fakultas Hukum Unpas)

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selama ini harus diakui telah memberikan peran politik masyarakat yang sangat signifikan dalam mewujudkan pesta demokrasi yang berlangsung secara “Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil” (vide, Pasal 22 E UUD 1945). Namun beberapa peristiwa dalam proses Pemilu tidak jarang membawa akibat yang mencederai tujuan demokrasi tersebut sehingga menghasilkan pemimpin yang justru tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Berbagai pelanggaran dalam pesta demokrasi masih kerap terjadi, seperti dugaan adanya *money politic* atau upaya mengarahkan bahkan memaksakan masyarakat pemilih untuk memilih calon-calon pemimpin atau kepala daerah tertentu yang masih kerap terjadi sebagaimana terekam dalam rekam jejak beberapa kali penyelenggaraan Pemilu/Pilkada sebelumnya. Kepala daerah yang terpilih dari hasil proses pemilihan yang disertai adanya kecurangan dimaksud, pada akhirnya akan

menghasilkan pemimpin yang ‘bermasalah’. Sebagai gambaran saat ini, tidak sedikit kepala daerah tersangkut masalah hukum (korupsi) dengan terjadinya beberapa kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Daerah, baik gubernur maupun beberapa Bupati/Walikota di beberapa daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Upaya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat pemilih merupakan salah satu cara

yang dapat mengikis habis setiap kali adanya kecurangan atau pelanggaran proses pemilihan. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, merupakan senjata yang ampuh untuk melawan berbagai bentuk kecurangan pemilu. Dengan demikian, pendidikan politik tentang pilkada dimaksud merupakan tanggung jawab seluruh *stake holder* pemilu, diantaranya adalah penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum/KPU/KPUD) dengan melibatkan secara aktif peran masyarakat akademis (perguruan tinggi).

Pembahasan

Tahun 2018, merupakan tahun yang sangat penting bagi beberapa daerah di Indonesia, dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Menurut data KPU RI, setidaknya terdapat 171 daerah yang akan melaksanakan Pilkada, diantaranya terdapat 17 provinsi dan salah satu provinsi yang akan menggelar Pilkada adalah Jawa Barat, yang akan menyelenggarakan Pemilihan gubernur, yang dalam hal ini dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemimpin bagi masyarakat Jawa Barat seluruhnya.

Seluruh peserta pemilu, dalam hal ini partai politik memahami benar bahwa dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, Jawa Barat merupakan daerah yang strategis dan menjadi tolok ukur pemenangan

pemilu di Indonesia. Faktor-faktor yang menjadikan Jawa Barat sebagai daerah strategis pemilihan yang selalu diperebutkan oleh para kontestan Pemilu, yaitu:

- (1) Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbesar dalam skala nasional, data KPU menunjukkan dalam pilpres 2014 pemilih Jawa Barat mencapai angka 33 juta orang atau hampir menyentuh 20% dari pemilih nasional dan di prediksi akan terus meningkat mencapai 37-38 juta pemilih di tahun 2018 dan 2019 (KPU, 2017).
- (2) Jawa Barat selain menjadi barometer kandidat perseorangan, juga menjadi barometer nasional bagi partai politik dan menjadi catatan khusus bahwa dalam setiap pileg, parpol yang bisa memenangkan suara secara mayoritas di Jawa Barat maka akan memiliki kans sangat besar bahkan mendekati sebuah kepastian untuk menjadi pemenang di tingkat nasional. Tren ini dapat dibuktikan dengan hasil Pemilu/Pilkada yang sudah dilaksanakan sejak 1999 hingga 2014.
- (3) Jawa Barat menjadi salah satu provinsi penopang perekonomian nasional, karena basis ekonomi Jawa Barat yang fokus pada usaha industri produktif dan utamanya industri pengolahan, pertanian dan perdagangan, telah memberikan sumbangan besar bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

(4). Jawa Barat adalah daerah penyangga ibu kota Indonesia, DKI Jakarta, Jumlah penduduk di daerah penyangga yaitu di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok sebesar 31,20% dari jumlah penduduk Jawa Barat atau seperempatnya tinggal di daerah penyangga ibu kota (BPS, 2017). Jumlah penduduk Jawa Barat yang besar di kawasan penyangga ibu kota negara akan memberikan dampak dan efek yang besar bagi hubungan Jawa Barat dengan politik nasional di Jakarta, baik dari sisi strategi, demografi dan etnografi.

Dengan melihat besarnya potensi yang dimiliki oleh Jawa Barat dalam skala nasional, tidak aneh jika banyak partai politik berebut untuk meraih suara terbanyak dan memenangkan setiap pertarungan politik di pemilihan umum, baik itu pilpres (pemilihan presiden), pileg (pemilihan legislatif) serta pilkada bupati/walikota dan gubernur. Hal ini karena Jawa Barat bisa menjadi instrumentasi utama bagi kepentingan partai politik yang mampu mengubah peta politik dan ekonomi nasional.

Peta persaingan calon pemimpin Jawa Barat menjelang Pilkada 2018, sudah mulai ramai dengan munculnya beberapa kandidat. Ridwan Kamil merupakan figur segar yang sedang naik daun karena prestasi dan inovasinya dalam memimpin Kota Bandung. Dedy Mizwar kandidat

petahana dengan penilaian kinerja relatif baik, sebagai wakil gubernur. Dedi Mulyadi, kini bupati Purwakarta, mendapat banyak penghargaan dan apresiasi karena gebrakannya membangun cagar budaya di Jabar. Sementara Dede Yusuf merupakan aktor kawakan yang sukses terjun ke politik. Adapun Aa Gym, merupakan ulama kharismatik yang punya basis pendukung yang patut diperhitungkan di Jabar. Dalam beberapa survei, Ridwan Kamil menunjukkan elektabilitas yang terpaut cukup jauh dibandingkan kandidat-kandidat lainnya.

Selanjutnya, Jawa Barat juga memiliki catatan unik tersendiri, karena selama ini cagub yang terpilih menjadi gubernur memilih cawagub dari kalangan artis yang populer di masyarakat, seperti pilgub sebelumnya yaitu Dede Yusuf dan Dedy Mizwar, maka dengan ini peluang wakil gubernur alternatif pun bisa bermunculan seperti nama Desy Ratnasari dan artis sekaligus politisi perempuan Golkar Jawa Barat Nurul Arifin, dan yang terpenting lagi cawagub harus bisa mendongkrak suara dan memiliki *chemistry* yang cocok dengan cagub yang akan maju dalam kontes demokrasi.

Salah satu lembaga survey, yaitu Indo Barometer mengungkap lima alasan responden dalam memilih calon gubernur, yakni dekat dengan rakyat (13.7 persen), kinerjanya bagus (10.8 persen), pintar/intelektual (9.0 persen), orangnya tegas (8.8 persen), dan berwibawa (7.9 persen). Dari

angka ini kita bisa mengambil gambaran bahwa pemilih Jawa Barat lebih mencari figur pemimpin yang dekat dengan rakyat dan tidak memiliki catatan buruk terkait tindak kejahatan korupsi dan berkinerja bagus, walau tentu kita harus mencari figur yang holistik, yaitu yang setidaknya mampu memenuhi mayoritas ekspektasi masyarakat terkait kepemimpinan, karena kita harus menghindari kandidat yang bisa menciptakan isu tidak baik terkait apa saja yang bisa menjadi bahan kampanye politik negatif serta hitam.

Terlepas dari siapa yang akan menjadi gubernur sebagai pemimpin masyarakat Jawa Barat nanti, salah satu parameter penting yang menentukan dalam proses penyelenggaraan pemilihan pemimpin (Pilkada) adalah seberapa jauh masing-masing kandidat dikenali dan mengenali daerahnya. Seorang calon pemimpin bukan hanya dituntut mempunyai perhatian kepada partai politik pendukungnya, juga kalangan partai politik yang turut meloloskannya (koalisi), melainkan memiliki kepedulian terhadap kondisi masyarakat di daerah pemilihannya.

Masyarakat Jawa Barat, yang pada umumnya merupakan 'urang Sunda' memiliki karakteristik budaya yang sesuai dengan keyakinan agama (mayoritas Islam), maka tidak salah apabila banyak kalangan menyebutkan bahwa budaya Sunda sebenarnya adalah Islam. Menjadi Islam berarti menyandarkan segala pola hidup kepada Al Quran dan Sunah Rasul sebagai pedoman hidup, termasuk

dalam hal kepemimpinan. Seorang pemikir muslim kenamaan, yaitu Ibnu Khaldun yang pemikirannya tentang masyarakat dan negara sangat modern melampaui zamannya, salah satunya membahas tentang perspektif kepemimpinan, yang ternyata sangat signifikan dengan kondisi saat ini, terutama kepemimpinan masyarakat sunda. Dalam pandangan Ibnu Khaldun kepemimpinan adalah sunnatulloh. Runtuh dan kokohnya suatu kekuasaan sangat bergantung pada *ashobiyah* (solidaritas sosial). Konsep *ashobiyah* ini menyiratkan perlunya ruang bagi konflik kepentingan antarpenguasa dan yang dikuasai sehingga kedua belah pihak saling memiliki posisi tawar-menawar untuk mencapai kepentingan yang saling menguntungkan.

Bagi Ibnu Khaldun, ikatan kesukuan lebih berpeluang menjadikan kepemimpinan menjadi kuat dibandingkan oleh lain suku. Dalam kasus kesundaan, perspektif kepemimpinan ini dapat diterapkan bahwa orang Sunda pituin dan memiliki jiwa kesundaan yang kuat akan lebih mampu menjaga dan mengayomi masyarakat dan lingkungannya karena ia akan merasa orang yang paling bertanggung jawab memajukan daerahnya. Ia tidak mencari hidup di Jawa Barat dalam berbagai segi.

Kepemimpinan berdasarkan *ashobiyah* tersebut, menurut Ibnu Khaldun memiliki enam karakter, yaitu: *Pertama*, seorang pemimpin harus berpengetahuan disertai kesanggupan untuk mengambil

keputusan-keputusan sesuai dengan hukum. Seorang pemimpin harus menempatkan hukum sebagai aturan yang pokok. Ia sendiri tidak boleh bermain dan mempermainkan hukum. *Kedua*, ia harus adil. Artinya bersikap jujur, berpegang pada keadilan, dan memiliki sifat-sifat moral yang baik sehingga perkataan dan tindakannya dapat dipercaya. *Ketiga*, ia memiliki kesanggupan menjalankan tugas-tugas yang dituntut dari padanya sebagai pemimpin pemerintahan, termasuk melaksanakan hukum yang diputuskan secara konsekuen. *Keempat*, secara fisik dan mental, ia harus bebas dari cacat yang tidak memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai pemimpin yang baik. *Kelima*, pemimpin sebuah pemerintahan harus berasal dan dipilih dari suku sendiri. *Keenam*, seorang pemimpin harus lemahlembut, sopan dan santun terhadap pengikutnya, serta harus mengutamakan kepentingan rakyat dan wajib membelanya, juga tidak mencari-cari kesalahan rakyat.

Keenam teori Ibnu Khaldun ini merupakan bukti nyata dalam setiap pola kepemimpinan manapun bahwa kepemimpinan yang didukung masyarakat yang berdasarkan solidaritas sosial dan berasal dari suku sendiri akan mampu menjadikan pemerintahannya menjadi kokoh.

Melihat kondisi kepemimpinan di negara tercinta, kita mungkin sepatutnya negara kita sekarang tengah mengalami krisis kepemimpinan, yang

mana berdampak langsung pada berbagai aspek di masyarakat seperti sosial, politik, budaya, agama, dan lainnya. Bagi masyarakat Jawa Barat, memilih pemimpin yang tepat adalah suatu keharusan untuk mengangkat kembali harkat dan martabat bangsa. Oleh karena itu, selain jiwa kepemimpinan yang melekat pada seorang pemimpin, maka masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi semestinya dapat menerapkan syarat-syarat kepada calon pemimpin yang akan dipilihnya.

Ada tiga ungkapan yang biasanya dijadikan prasyarat bagi mereka yang berminat menjadi pemimpin, khususnya di tatar Sunda atau Jawa Barat. Ungkapan itu adalah *Nyantri*, *Nyakola*, dan *Nyunda*. Untuk ungkapan yang pertama atau *nyantri* ini, pemimpin harus memiliki kecerdasan spiritual yang disimbolisasikan dengan istilah *Nyantri*. Spiritual menjadi harga mati sebagai benteng terakhir agar seorang pemimpin sadar betul bahwa kepemimpinannya itu adalah amanah dan harus dipertanggungjawabkan. Dalam era global, pemerintahan dan perusahaan besar yang dapat bertahan sesungguhnya berjangkar pada kunci kepekaan kesiantrian ini. *Nyakola* sesungguhnya simbol dari seseorang yang lebih mementingkan nalar ketimbang tubuh. Nalar tidak pernah berhenti berpikir. Tidak pernah berpikir juga menggadai nalar untuk kepentingan sesaat, memburu kekuasaan dengan cara yang tidak terhormat. Untuk ungkapan yang ketiga atau *Nyunda* ini tidak

harus dimaksudkan secara reduktif sekadar referensi etnis geografis yang merujuk pada wilayah Pasundan saja, tetapi *Nyunda* adalah diksi dengan makna seperangkat nilai-nilai kesundaan yang harus dimiliki oleh para pemimpin dan calon pemimpin. *Nyunda* sebenarnya mencerminkan, diantaranya sosok pemimpin yang mampu menyatu dengan rakyat secara tulus (*ngumawula ka wayahna*), pribadi yang tidak bertingkah (*teu ningkah*), tidak memperlihatkan sikap tinggi hati kepada orang lain (*teu adigung kamagungan*), tidak suka dimeriahkan dengan kemegahan (*teu paya diagreng-agreng*), arif dan adil (*agung maklum sarta adil*), dan mustahil korupsi (*cadu basilat*).

Penutup

Berdasarkan hal tersebut di atas, lalu siapakah yang akan menjadi pemimpin masyarakat Jawa Barat pada Pilkada 2018? Adakah syarat pemimpin yang "*nyantri, nyakola, nyunda*" pada para kandidat saat ini? Melalui tulisan ini, semoga dapat memberikan sedikit pencerahan, gambaran dan harapan bahwa kita juga bisa mempunyai pemimpin yang kompeten, jujur, adil dan dihormati. Jika petuah para sesepuh itu dijalankan dan dilaksanakan secara bijak, maka akan terasa manfaat dan dampaknya, baik bagi pemimpin Jawa Barat atau pemimpin yang lebih tinggi lagi, maka tidak menutup kemungkinan tanah dan bangsa yang kita pijak ini akan kembali damai sejahtera.

Daftar Pustaka

- Dudi Warsudin, Dr. 2017. "Pengisian Jabatan Kepala Daerah Provinsi Secara Demokratis Pasca Amendemen Undang-Undang Dasar 1945". Disertasi: Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum, Program Pasca sarjana Universitas Pasundan, Bandung.
- Kristiadi J, 1997. *Menyelenggarakan Pemilu yang Bersifat Luber dan Jurdil*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
- M. Dudi Hari Saputra, Peta Politik dan Dinamika Pilkada Jawa Barat 2018. "(<https://indonesiana.tempo.co/.../peta-politik-dan-dinamika-pilkada-jawa-barat-2018>)"
- Moh. Mahfud MD, 1999. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Nanat Fatah Natsir, M.S., Prof. Dr. Makalah : "Mencari Akar Historis Krisis Kepemimpinan Orang Sunda", UIN Sunan Gung Djati, 2010 (<http://indoculture.wordpress.com/2008/03/19/mencari-akar-historis-krisis-kepemimpinan-orang-sunda/>).
- Paguyuban Mahasiswa Sastra Sunda (PAMASS), Makalah "Figur Pemimpin Sunda yang Merefleksikan Nilai Kepemimpinan Sunda dan Implementasinya", Program Studi Sastra Daerah, Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, Jatinangor, 2011. (<https://imbasadi.wordpress.com/.../figur-pemimpin-sunda-yang-merefleksikan-nilai-k...>)